

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 17 Tahun 2003. Lembaran Negara Nomor 4286 Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 5587 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. PP Nomor 58 Tahun 2005. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Lembaran Negara Tahun 2006.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*. Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. Lembaran Negara Nomor 825 Tahun 2017.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018*. Perda Nomor 17 Tahun 2017. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2018*. Perda Nomor 8 Tahun 2018. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Walikota Kota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018*. Perwal Nomor 1 Tahun 2018. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Walikota Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018*. Perwal Nomor 1 Tahun 2018. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bogor. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018.

## B. Buku

Brantakusuma, Deddy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Djaenuri, H. M. Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Gaffar, Syaekani H.R, Affan dan M. Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Handoyo, B. Hestu Cipto dan Y. Theresjanti. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Hariadi, Pramono dan Yanuar Restianto. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

H. R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.

Misdayanti dan R. G. Kartasapoetra. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Monteiro, Josef Mario. *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Malang: Inteligencia, 2017.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Nurcholis, Hanif. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

\_\_\_\_\_. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Pemerintah Kota Bogor. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor*. Bogor: Pemerintah Kota Bogor, 2019.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Ritonga, Irwan Taufik. *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2010..

Sukarna. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2011.

Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

\_\_\_\_\_. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Widodo, Joko. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

### C. Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly. "Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan". *Makalah Masukan Dalam Rangka Perubahan UU MD3*, [http://:www.jimly.co](http://www.jimly.co). diakses pada tanggal 31 September 2019.

Info anggaran. "Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah". <https://info-anggaran.com>. diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Oyan, James. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". <http://www.unsrat.co.id>. diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

P, Dewi. "Pengertian Keuangan Daerah". <http://www.Definisi-Pengertian.com>. diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

Rahmawati, Laily. "Inilah Nama-Nama Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019". <http://bogornews.com>. diakses pada 02 Agustus 2019.

Santoso, Rumi. *Hasil Wawancara dengan Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Bogor*. pada tanggal 31 Juli 2019.